



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

**PENGUMUMAN
SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor : 3488 /WKPTUN.W3.TUN3/HM.1.1.1/XI/2025**

Berdasarkan:

1. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 28/DJMT/KEP/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 3432/KPTUN.W3-TUN3/SK.OT1.1/XI/2025 tanggal 11 November 2025 Tentang Penunjukan Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta membuka pendaftaran untuk seleksi Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Umum
 - a. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum
 - b. Ruang lingkup : Pemberi Layanan Bantuan Hukum
 - c. Lokasi Pekerjaan : Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
 - d. Alamat : Jl. Janti no.66 Banguntapan Bantul, D.I.Yogyakarta
 - e. Sumber dana : DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2026.
2. Diperuntukkan bagi:
 - a. Lembaga masyarakat sipil Penyedia Advokasi Hukum dan/atau;
 - b. Unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi Advokat dan/atau;
 - c. Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
3. Syarat pendaftaran :
 - a. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi.
 - b. Memiliki NPWP Badan Hukum.
 - c. Telah terakreditasi sebagaimana SK Menteri Hukum dan HAM.
 - d. Memiliki akta pendirian Lembaga.
 - e. Memiliki stuktur kepengurusan Lembaga.
 - f. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas;
 - g. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
 - h. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara / beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan melampirkan fotocopy Salinan Putusan dan memahami mekanisme layanan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Jalan Raya Janti Nomor 66 Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198
www.ptun-yogyakarta.go.id, ptunjogja@mahkamahagung.go.id

- i. Memiliki minimal 1 orang advokat.
- j. Memiliki staf yang nantinya bertugas di ruang Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang bergelar minimal Sarjana Hukum.
- k. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.
- l. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir kontrak.
- m. Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas.
- n. Tidak masuk dalam daftar hitam.
- o. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan hasil seleksi.
- p. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
- q. Lulus tes kualifikasi yang ditentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
- r. Penyedia telah terdaftar dalam Aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).

Surat pendaftaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Telp/WA (0274) 520502.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Yogyakarta, 25 November 2025

Ketua Panitia Seleksi, *R.*

RETNO NAWANGSIH